

**Peran Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Pencegahan
Dan Pemberantasan Tindak Pencucian Uang (Analisis Putusan PN Nomor:
43/PID.SUS/2016/PN JktPst)**

Oleh

Alifia Elsa Salsabilah

Abstrak

Pencucian uang merupakan fenomena yang aktual di industri perbankan hingga saat ini. Tindakan yang tidak pernah terlepas dari tindak pidana asalnya ini pun telah dikriminalisasi di Indonesia. Dengan begitu, berarti masyarakat menyadari akan bahaya dan kerugian yang diakibatkan dari tindakan ini. Guna mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, Indonesia telah membentuk suatu lembaga independen yang bernama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau yang dikenal dengan PPATK. Tulisan ini membahas mengenai peran dan fungsi dari PPATK dalam melakukan penegakan hukum atas adanya tindak pidana pencucian uang dengan mengambil contoh kasus pencucian uang yang diduga dilakukan oleh oknum eks pegawai HSBC Indonesia. Pokok permasalahan tersebut dijawab dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang meliputi studi kepustakaan dan wawancara dan kemudian menghasilkan kesimpulan bahwa peran dan fungsi PPATK dalam kasus ini lebih mengarah kepada peran yang bersifat represif yakni penanganan atas tindak pidana pencucian uang itu sendiri. Peran dari PPATK ini juga membantu aparat penegak hukum untuk membuktikan bahwanmemang benar oknum eks pegawai HSBC tersebut dapat dijerat dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kata Kunci: Peran PPATK, Tindak Pidana Pencucian Uang.

***The Role Of Indonesian Financial And Transaction Reports And Analys Center
In Preventing And Combating Money Laundering (Analysis Adjudication
Registered Number: 43/PID.SUS/2016/PN JktPst)***

By

Alifia Elsa Salsabilah

Abstract

Money laundering is recently an actual phenomenon in banking industry. The action that has never been apart from the predicate crime has been criminalized in Indonesia Therefore, the society begins to recognize the danger and losses caused by this action. To prevent and expel the money laundering, Indonesia has established an independent agency called The Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center known as INTRAC This paper discusses the role and function of INTRAC in enforcing the law of money laundering by taking samples of suspected cases, carried out by former individual employees of HSBC Indonesia. The principal problem is answered by using normative juridical research method, which includes literature studies and interviews. It leads to the conclusion that the role and function of INTRAC in this case is more directed to the repressive role of the handling on money laundering itself The role of INTRAC has also helped law enforcement officials to prove that the former individual employees of HSBC might be entangled with Article 3 of Law Number 8 Year 2010 concerning The Prevention and Eradication of The Crime of Money Laundering.

Key Words: The role of INTRAC, Money Laundering.